

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Kajian Pustaka menjelaskan beberapa teori, hasil penelitian terdahulu dan publikasi umum yang relevan dan berhubungan dengan variabel-variabel penelitian. Adapun kajian pustaka yang dikemukakan adalah sebagai berikut :

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori Ini dikembangkan oleh (Jensen & Meckling, 1976) yang menunjukkan bahwa Teori *Keagenan (Agency Theory)* merupakan hubungan kontrak antara *principals* dan *agent*, yaitu masyarakat sebagai *principals* dan pemerintah sebagai *agents*. teori keagenan menjelaskan bahwa pemerintah sebagai *agents* bagi masyarakat tentu akan melakukan kegiatan selain dalam memenuhi pelayanan bagi masyarakat tetapi juga dalam memenuhi kepentingan pribadinya. Teori keagenan ini dapat diterapkan kepada organisasi sektor publik, dimana tujuan organisasi sektor publik yakni memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menyusun kebijakan yang tepat, anggaran yang sesuai, serta pengalokasian belanja modal yang baik dalam membangun infrastruktur, pembangunan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Masalah keagenan yang timbul disebabkan bahaya moral dan proses seleksi terhadap *agents* yang salah,

dimana masyarakat lebih cenderung tidak mengetahui karakteristik asli maupun tujuan dari *agents* tersebut karena perilaku oportunistik nya dalam mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri yang biasanya sering dilakukan saat penyusunan biaya anggaran. (Halim & Abdullah, 2006).

2.1.2 Teori Ketergantungan Sumber Daya

Teori ketergantungan sumber daya dikemukakan oleh (Emerson, 1961) menjelaskan tentang hubungan antara konsep kekuasaan dengan konsep ketergantungan dalam suatu organisasi. Ketergantungan merupakan bagian utama dari kekuasaan, dimana organisasi yang memiliki kekuasaan yang berkaitan dengan lingkungan sekitar terkait tugas dan wewenang organisasi tersebut.

Teori *Ketergantungan sumber daya* menjelaskan mengenai hubungan antar organisasi. Sebuah organisasi dipandang memiliki sifat seperti makhluk hidup (organisme) yang survavilitasnya akan tergantung pada lingkungan. Organisasi mengambil sumber daya dari lingkungannya, seperti bahan baku dan tenaga kerja. Organisasi yang mampu menguasai sumber daya vital atau bisa mengurangi ketidakpastian dalam hubungannya dengan organisasi lain akan memiliki kekuatan (power) yang paling besar. Teori *ketergantungan sumber daya* menjelaskan bahwa organisasi adalah konsekwensi dari kemampuan mereka mempengaruhi, sehingga organisasi yang hidupnya tergantung pada subsidi pemerintah biasanya akan cenderung lebih taat pada perintah (aturan) pemerintah. (Pfeffer & Salancik, 1978).

Teori ketergantungan sumber daya menggambarkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam mengelola dan mengurus daerahnya masing-masing. Pada sektor publik menggambarkan kekuasaan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola daerahnya masing-masing dan tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat dalam mencapai tujuan organisasi untuk memberikan pelayanan yang sesuai standar kepada masyarakat. (Sari & Arza, 2019).

2.1.3 Kemandirian Keuangan

2.1.3.1 Pengertian Kemandirian Keuangan

Definisi Kemandirian Keuangan Daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan, pembangunan, dan pelayanan pemerintahan kepada mereka yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang dibutuhkan daerah. (Halim A. , 2012).

Definisi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah adalah Kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri penyelenggaraan, pembangunan, dan pelayanan pemerintahan kepada pihak yang telah membayar pajak dan royalti sebagai sumber penerimaan yang dikeluarkan oleh daerah. Selain itu, tingkat kemandirian keuangan daerah juga menunjukkan seberapa besar ketergantungan daerah terhadap sumber eksternal terutama pemerintah pusat dan provinsi. (Mahmudi, 2010). Rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan

ketergantungan daerah terhadap sumber eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pemerintah pusat semakin rendah dan demikian sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. (Havid & Yanuar, 2012).

Kemandirian keuangan adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah dengan tidak bergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan didalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan-perundangan. (Rukmana & Vidi, 2013).

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. (Faud, 2016).

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah dalam membiayai kegiatan pemerintah daerah dan pembangunan daerah secara mandiri terlepas dari pendapatan daerah

yang berasal dari sumber bantuan Pemerintah Pusat. Kemandirian finansial suatu daerah bersumber dari besarnya pendapatan daerah itu sendiri. (Halim, 2012; Mahmudi, 2010; Havid & Yanuar, 2012; Rukmana & Vidi, 2013; Faud, 2016).

2.1.3.2 Indikator Kemandirian daerah

Rumus Rasio Kemandirian Keuangan (Syurmita, 2014) sebagai berikut :

$$Kemandirian\ Keuangan = \frac{Pendapatan\ Asli\ Daerah}{Total\ Belanja\ Daerah}$$

Adapun rumus Rasio Kemandirian Keuangan (Faud, 2016) sebagai berikut

:

$$Kemandirian\ Keuangan = \frac{Pendapatan\ Asli\ Daerah}{Transfer\ Pusat/Provinsi}$$

Penulis menggunakan rasio kemandirian keuangan yang dirumuskan oleh (Syurmita, 2014) karena rasio kemandirian keuangan daerah merupakan suatu indikator yang dapat mengukur kemampuan keuangan daerah dalam membiayai sendiri penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, dan pembangunan daerah kepada pihak yang telah membayar pajak sebagai sumber penerimaan yang telah dikeluarkan oleh daerah dengan sedikit bergantung kepada sumber dana pemerintah pusat. Kemandirian suatu daerah dapat dilihat dari kemampuan daerah dalam mengelola pendapatan asli daerah guna penyelenggaraan urusan pemerintah daerahnya sendiri.

Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Peengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014).

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014).

Tabel 2. 1 Penggunaan Indikator Oleh Penelitian Terdahulu

| No | Nama Peneliti | KK=PAD/Transfer | KK=PAD/Belanja |
|----|---|-----------------|----------------|
| 1 | Syurmita (2014) | | √ |
| 2 | Agus Tubels (2015) | | √ |
| 3 | Khoirul Fuad (2016) | √ | |
| 4 | Sri Husniati, Fitriasuri, dan Roliah Wahasusmiah (2016) | √ | |
| 5 | Dewi Sartika (2016) | √ | |
| 6 | Abdul Halim, Maria Odriana Veronica Moi, dan Revrison Baswir (2016) | √ | |
| 7 | Dedi Rusdi dan Khoirul Fuad (2017) | √ | |
| 8 | Ni Luh Made Dwi Indri Mutia Mahayani dan Gayatri (2017) | | √ |
| 9 | Mutiara Sari dan Fefri Indra Arza (2019) | | √ |
| 10 | Yoli Wulandari dan Fefri Indra Arza (2020) | | √ |
| 11 | Fitrah Illahi, Rice Haryati, dan Dica Lady Silvera (2021) | √ | |
| 12 | Mutiara Pangku dan Lukfiah Irwan Radjak (2021) | √ | |
| 13 | Melati Tegari Islamiyah, Ifa Ratifah, dan Firdaus (2022) | | √ |
| 14 | Elfiyana dan Fefri Indra Arza (2022) | | √ |
| 15 | Fibrian Cahyo Pranoto, Handoko Arwi Hasthoro dan Nurwiyanta (2022) | | √ |
| | | 7 | 8 |

2.1.3.3 Pola Hubungan Kemandirian Keuangan Daerah

Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah antara lain:

- a. Pola hubungan Instruktif, peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah.
- b. Pola hubungan Konsultatif, campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi.
- c. Pola hubungan Partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiannya mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah.
- d. Pola hubungan Delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah. (Halim A. , 2012).

2.1.3.4 Faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah

Faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah (Tangkilisan, 2007:89-92), antara lain :

1. Potensi ekonomi daerah, indikator yang banyak digunakan sebagai tolak ukur potensi ekonomi daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
2. Kemampuan Dinas Pendapatan Daerah, Artinya kemandirian keuangan daerah dapat ditingkatkan secara terencana melalui kemampuan atau kinerja institusi atau lembaga yang inovatif dan pemanfaatan lembaga dispenda untuk meningkatkan penerimaan daerah.

2.1.4 Derajat Desentralisasi

2.1.4.1 Pengertian Derajat Desentralisasi

Desentralisasi diartikan sebagai penyerahan wewenang pemerintah, oleh pemerintah (pusat) kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Undang-Undang No. 23 Tahun 2014). Definisi Desentralisasi fiskal merupakan pengalihan tanggung jawab dan kewenangan keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yang dapat meningkatkan atau menurunkan laju pertumbuhan ekonomi. (Bodman & Hodge, 2009). Definisi Desentralisasi merupakan pemberian kekuasaan atau fungsi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Desentralisasi dilaksanakan dengan tujuan untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi daerah dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan yaitu memaksimalkan potensi yang dimiliki setiap daerah. (Sartika, 2016).

Definisi Derajat desentralisasi fiskal atau biasa disebut dengan derajat otonomi fiskal daerah merupakan aspek yang sangat penting dalam pelaksanaan otonomi daerah secara keseluruhan, hal ini disebabkan derajat desentralisasi merupakan gambaran dengan kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dan diikuti dengan kemampuan pajak karena dengan kemampuan pajak, maka pemerintah daerah akan memiliki sumber dana pembangunan yang besar. (Sistiana & Makmur, 2014). Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pendapatan asli daerah dengan total pendapatan

daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD, maka semakin tinggi kemampuan pemerintah dalam penyelenggaraan desentralisasi. (Mahmudi, 2016).

Maka dapat disimpulkan dari beberapa definisi diatas bahwa Derajat Desentralisasi merupakan kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber daya keuangan daerahnya untuk penyelenggaraan yang ditugaskan oleh pemerintah pusat kepada daerah dalam mengatur dan mengelola daerahnya. Pemerintah Daerah dengan memiliki derajat desentralisasi yang tinggi maka memiliki kewenangan yang lebih banyak dalam menyelenggarakan desentralisasi karena Pendapatan Asli Daerahnya yang tinggi dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. (UU No. 23 Tahun 2014; Bodman & Hodge, 2009; Sistiana & Makmur, 2014; Sartika, 2016; Mahmudi, 2016).

2.1.4.2 Indikator Derajat Desentralisasi

Untuk melihat Derajat Desentralisasi Fiskal antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Halim A. , 2004) yaitu :

$$Derajat\ Desentralisasi = \frac{\text{Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak untuk Daerah (BHPBP)}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

$$Derajat\ Desentralisasi = \frac{\text{Sumbangan Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

Rasio Derajat Desentralisasi di rumuskan (Mahmudi, 2016) sebagai berikut :

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

Penulis menggunakan rasio derajat desentralisasi yang dirumuskan oleh (Mahmudi, 2016), karena derajat desentralisasi menggambarkan kontribusi pendapatan asli daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tingkat kekuatan Pemerintah dalam melakukan kebijakan untuk mengurus dan mengatur daerahnya, sehingga Pemerintah yang memiliki PAD yang tinggi menunjukkan tingkat derajat desentralisasi yang tinggi dalam mengurus pemerintahannya dengan mengandalkan pendapatan asli daerahnya.

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014).

2.1.4.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Derajat Desentralisasi

Faktor-faktor yang mempengaruhi derajat desentralisasi (Muluk, 2009) sebagai berikut :

- a. Derajat desentralisasi dapat dilihat dari fungsi atau pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, semakin sentralisasi fungsi maka semakin tinggi derajat desentralisasi.
- b. Ada dua jenis otorisasi fungsional. Dalam hal ini, khususnya mekanisme terbuka atau otoritas bersama dan doktrin *superpower*, jika otoritas lokal memiliki fungsi delegasi tipe otoritas umum, semakin besar tingkat desentralisasi yang dapat dipertimbangkan.
- c. Relevansi keuangan mengacu pada derajat desentralisasi dalam pengambilan keputusan, baik dalam hal penerimaan maupun pengeluaran dari pemerintah daerah.

- d. Tentang bentuk pemerintahan daerah. Derajat desentralisasi akan semakin tinggi jika sumber kewenangan daerah berasal dari keputusan legislatif bukan dari mandat dan eksekutif.
- e. Ketergantungan fungsional pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, ditambah persentase bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, berarti besarnya ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat, semakin besar tingkat desentralisasi semakin rendah.
- f. Luas wilayah pemerintahan KEK mengasumsikan bahwa semakin luas wilayah maka semakin besar derajat desentralisasinya. Namun, karena pemerintah daerah lebih mampu menangani masalah dominasi pusat atas daerah, hubungan antara ukuran dan kontrol daerah tetap terbuka untuk diperdebatkan.
- g. Politik kepartaian, jika politik partai lokal masih didominasi oleh organisasi politik nasional, maka derajat desentralisasi dianggap lebih rendah daripada politik tingkat lokal yang merupakan organisasi politik nasional, kekeluargaan dan lebih mandiri.

2.1.5 *Financial distress*

2.1.5.1 Pengertian *Financial Distress*

Financial distress pada pemerintahan diartikan seperti kegagalan memenuhi standar kinerja, utang, dan kebutuhan masyarakat selama bertahun-tahun berturut-turut (Kleine & Weissert, 2005). *Financial distress* dapat diartikan sebagai kondisi penting yang melibatkan ketidakseimbangan antara biaya dan pendapatan secara berkelanjutan. (Trussel & Patrick, 2009).

Definisi *Financial distress* merupakan ketidakmampuan pemerintah untuk menyediakan pelayanan pada publik sesuai standar mutu pelayanan yang telah ditetapkan. Ketidakmampuan pemerintah ini karena pemerintah tidak mempunyai ketersediaan dana untuk diinvestasikan pada infrastruktur yang digunakan dalam penyediaan pelayanan pada publik tersebut. (Jones & Walker, 2007). *Financial distress* pemerintah daerah didefinisikan sebagai ketidakmampuan pemerintah daerah dalam mengembalikan baik pokok maupun bunga pinjaman. (Sutaryo, 2012). Pada pemerintah daerah, *Financial distress* ditandai dengan tidak terkendalinya pengeluaran yang dilakukan untuk belanja rutin, sehingga pemerintah daerah menekan pengeluaran untuk belanja modal atau belanja investasi. (Syurmita, 2014).

Financial distress adalah ketidakmampuan pemerintah untuk menyediakan pelayanan publik sesuai standar mutu pelayanan yang ditetapkan. Salah satu standar mutu pelayanan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah adalah alokasi belanja modal. Adapun standar mutu pelayanan berupa belanja modal adalah sebesar 30% berdasarkan pedoman penyusunan anggaran pendapatan

dan belanja daerah (Sartika, 2016). Belanja Modal memegang peranan penting dalam pelayanan publik, semakin kecil proporsi dana yang dialokasikan untuk belanja modal maka akan berdampak terhadap pembangunan yang dilakukan untuk memberikan pelayanan yang memadai untuk masyarakat.

Dapat disimpulkan berdasarkan uraian diatas bahwa *Financial distress* terjadi karena minimnya alokasi belanja modal dan kegagalan atau ketidakmampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dikarenakan pemerintah lebih memperhatikan belanja rutin yang sifatnya kurang produktif dan tidak efisien yang mengakibatkan masyarakat tidak dapat menikmati pelayanan publik. (Kleine & Weissert, 2005; Jones & Walker, 2007; Sutaryo, 2012; Syurmita, 2014).

2.1.5.2 Indikator *Financial Distress*

Dalam mengukur *Financial distress* pemerintah daerah terdapat dua cara yang dapat digunakan sebagai berikut :

Financial distress pemerintah daerah dapat diukur menggunakan rumus DSCR (Sutaryo, 2012) sebagai berikut :

$$DSCR = \frac{(PAD + BD + DAU) - Belanja Pegawai}{Angsuran Pokok + Bunga Pinjama + Biaya Lain}$$

Adapun cara mengukur *Financial distress* dengan memproyeksikan rasio belanja modal. rumus rasio belanja modal (Mahmudi, 2016) sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}}$$

Penulis mengukur status *financial distress* dalam penelitian ini dengan memproyeksikan rasio belanja modal terhadap total belanja menurut (Mahmudi, 2016), karena dalam pengukuran ini menggambarkan sejauh mana pemerintah daerah mengalokasikan APBD dalam hal proporsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal pada tahun anggaran. Apabila pemerintah menghabiskan sebagian besar anggaran yang dimilikinya untuk belanja yang bersifat rutin (belanja operasi) maka dikhawatirkan Pemerintah Daerah tidak lagi memiliki kecukupan dana untuk kebutuhan membangun infrastruktur pelayanan publik, seperti membangun sekolah, rumah sakit, jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya. Pemerintah Pusat mensyaratkan belanja modal daerah yang optimal adalah 30% dari total belanja daerah melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia No.2 Tahun 2015-2019 dan jika alokasi belanja modal kurang optimal dari ketentuan yang telah ditetapkan dikhawatirkan Pemerintah Daerah mengalami kondisi *financial distress*, sehingga tidak mampu untuk memberikan pelayanan yang memadai bagi masyarakat. (Sari & Arza, 2019).

Belanja modal adalah belanja langsung pemerintah yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya (aset tak berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*). (Peraturan Menteri dalam Negeri No.33 Tahun 2017).

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu yang menjadi faktor-faktor mempengaruhi *Financial Distress*, dapat dilihat pada tabel 2.2 :

Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu

| No | Nama Peneliti | Judul Penelitian | Variabel Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|------------------------------|---|---|---|
| 1. | Syurmita (2014) | Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Prediksi <i>Financial distress</i> | <p>Variabel Independen: Kemandirian Keuangan, Derajat Desentralisasi, Solvabilitas, Populasi Penduduk, Pemekaran Wilayah.</p> <p>Variabel Dependen: <i>Financial distress</i></p> | <p>Kemandirian Keuangan Berpengaruh Negatif terhadap <i>Financial distress</i>. menunjukkan bahwa kemandirian keuangan yang tinggi, cenderung tidak akan mengalami <i>financial distress</i>.</p> <p>Derajat Desentralisasi berpengaruh positif terhadap <i>Financial distress</i>. Menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang memiliki derajat desentralisasi yang tinggi, cenderung akan mengalami <i>financial distress</i>, sedangkan pemda yang memiliki derajat desentralisasi yang rendah cenderung tidak mengalami <i>financial distress</i>.</p> |
| 2. | Dian Indriana Hapsari (2014) | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Prediksi <i>Financial Distress</i> Pada Pemerintah Daerah | <p>Variabel Independen: Derajat Desentralisasi, Rasio Solvabilitas,</p> | <p>Derajat Desentralisasi berpengaruh positif terhadap <i>Financial distress</i>. Menunjukkan bahwa pemerintah daerah</p> |

| No | Nama Peneliti | Judul Penelitian | Variabel Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|---------------------|---|--|---|
| | | Kabupaten Dan Kota Di Indonesia | Pemekaran Wilayah Variabel Dependen: <i>Financial distress</i> | yang memiliki derajat desentralisasi yang tinggi, cenderung akan mengalami <i>financial distress</i> , terjadi penyalahgunaan wewenang. Pemerintah daerah yang “kaya” yang memiliki pendapatan asli daerah (PAD) tinggi, justru dengan wewenang yang dimilikinya telah melakukan pemborosan anggaran untuk pengeluaran belanja rutin (operasional). Dalam hal ini pemerintah daerah memiliki komponen belanja rutin lebih dari 70% dari total belanja, sehingga tidak lagi memiliki kecukupan dana untuk melakukan pembangunan daerah, menyediakan fasilitas pelayanan publik, dan pengeluaran belanja modal lainnya. |
| 3. | Agus Tubels (2015) | Evaluasi <i>Financial Distress</i> Pada Pemerintah Kota Bandar Lampung | Variabel Independen: Kemandirian Keuangan, Derajat Desentralisasi, Solvabilitas, Jumlah Penduduk Variabel Dependen: <i>Financial distress</i> | Terdapat hubungan sangat kuat antara <i>Financial Distress</i> dengan Kemandirian Keuangan Terdapat hubungan sangat kuat antara <i>Financial Distress</i> dengan Derajat Desentralisasi |
| 4. | Khoirul Fuad (2016) | A Method Of Predicting Local Governments’ <i>Financial Distress</i> By Using Ratio Of | Variabel Independen: Kemandirian Keuangan, | Kemandirian Keuangan tidak berpengaruh signifikan Negatif |

| No | Nama Peneliti | Judul Penelitian | Variabel Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|--|---|---|--|
| | | Independence, Expenditure Conformity And Growth Of Regional Revenue | Pertumbuhan PAD, Keselerasan Belanja. Variabel Dependen: <i>Financial distress</i> | terhadap <i>Financial Distress</i> |
| 5. | Sri Husniati, Fitriasuri, dan Roliah Wahasumiah (2016) | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi <i>Financial distress</i> | Variabel Independen: Kemandirian Keuangan, Derajat Desentralisasi, Solvabilitas, Rasio Kinerja Keuangan, Rasio Posisi Keuangan, Rasio Efisiensi, Kompleksitas Pemerintah, Pemekaran Wilayah Variabel Dependen: <i>Financial distress</i> | Kemandirian Keuangan tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap prediksi <i>Financial distress</i> . Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang tidak menunjukkan nilai yang signifikan. Derajat Desentralisasi berpengaruh positif terhadap prediksi <i>Financial distress</i> . |
| 6. | Dewi Sartika (2016) | Analisis Prediksi <i>Financial distress</i> Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia Periode 2011-2013 | Variabel Independen: Kemandirian Keuangan, Derajat Desentralisasi, Solvabilitas Variabel Dependen: <i>Financial distress</i> | Kemandirian Keuangan Berpengaruh Positif terhadap <i>Financial distress</i> . Derajat Desentralisasi tidak berpengaruh positif terhadap <i>Financial distress</i> . Hal ini ditunjukkan bahwa nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05. |
| 7. | Abdul Halim, Maria Odriana | <i>Fiscal Distress Of Local Government Study On Regencies/Cities In</i> | Variabel Independen: | Derajat Desentralisasi tidak berpengaruh negatif |

| No | Nama Peneliti | Judul Penelitian | Variabel Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|---|---|---|---|
| | Veronica Moi, dan Revrison Baswir (2016) | <i>The Provinces Of East Nusa Tenggara, Maluku, And North Maluku</i> | Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan, dan Kemandirian Keuangan. Variabel Dependen: Derajat Desentralisasi | terhadap <i>Financial distress</i> . Kemandirian Keuangan negatif tidak berpengaruh terhadap <i>Financial distress</i> . |
| 8. | Dedi Rusdi dan Khoirul Fuad (2017) | <i>The Method Of Measuring Ummat Welfare From Financial distress Perspective</i> | Variabel Independen: Kemandirian Keuangan, Keselerasan Belanja, dan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah. Variabel Dependen: <i>Financial distress</i> | Kemandirian Keuangan tidak berpengaruh terhadap <i>Financial distress</i> . |
| 9. | Ni Luh Made Dwi Indri Mutia Mahayani & Gayatri (2017) | Jumlah Penduduk Sebagai Pemoderasi Pengaruh Kemandirian Keuangan Dan <i>Level Of Capital Outlay Terhadap Financial Distress</i> | Variabel Independen: Kemandirian Keuangan, <i>Level Of Capital Otlay</i> , Jumlah Penduduk Variabel Dependen: <i>Financial distress</i> | Kemandirian Keuangan berpengaruh positif dan signifikan pada <i>Financial Distress</i> . Tingkat kemandirian keuangan yang tinggi belum tentu dapat memberikan pelayanan dan infrastruktur publik yang sesuai dengan standar dikarenakan pendapatan yang diterima oleh daerah tidak sepenuhnya dianggarkan untuk belanja modal yang sesuai dengan target yang telah ditentukan, ataupun apabila belanja modal sudah dianggarkan sesuai target tetapi dalam pengrealisasiannya belum |

| No | Nama Peneliti | Judul Penelitian | Variabel Penelitian | Hasil Penelitian |
|-----|--|---|--|--|
| | | | | cukup mampu mengejar peningkatan belanja modal. Sehingga semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan semakin tinggi pula tingkat kemungkinan terjadinya <i>financial distress</i> karena ketidakefisienan dan ketidaefisiensi dalam masalah penganggaran dan pengrealisasian anggaran. |
| 10. | Rida Damai Yanti (2018) | Kemampuan Rasio Keuangan Dalam Memprediksi Status <i>Financial distress</i> Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Barat Periode 2012-2016 | Variabel Independen: Short Term Solvency Ratio, Long Term Solvency Ratio, Budgetary Solvency Ratio, Financial Flexibility Ratio, Kemandirian Keuangan (Financial Independence Ratio) Variabel Dependen: <i>Financial distress</i> | Kemandirian Keuangan Berpengaruh Negatif terhadap <i>Financial distress</i> . Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan yang tinggi pada pemerintah daerah cenderung tidak akan mengalami <i>financial distress</i> . |
| 11. | Mutiara Sari dan Fefri Indra Arza (2019) | Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kondisi <i>Financial distress</i> Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Se-Indonesia Periode 2015-2017 | Variabel Independen: Kemandirian Keuangan, Derajat Desentralisasi, Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Pemekaran Wilayah Variabel Dependen: <i>Financial distress</i> | Kemandirian Keuangan Berpengaruh Positif terhadap <i>Financial distress</i> . Hal ini tidak selamanya semakin tinggi PAD maka semakin tinggi total belanja yang akan dialokasikan untuk memberikan pelayanan untuk menghindari kondisi <i>financial distress</i> . Derajat Desentralisasi berpengaruh negatif |

| No | Nama Peneliti | Judul Penelitian | Variabel Penelitian | Hasil Penelitian |
|-----|---|---|---|--|
| | | | | <p>terhadap <i>Financial distress</i>. Semakin tinggi derajat desentralisasi maka probabilitas pemerintah daerah untuk mengalami kondisi <i>financial distress</i> akan semakin kecil. Pemerintah daerah yang memiliki ketergantungan terhadap pemerintah pusat akan cenderung mengalami <i>financial distress</i>.</p> |
| 12. | Yoli Wulandari & Fefri Indra Arza (2020) | Pengaruh Faktor Keuangan Dan Karakteristik pemerintah Daerah Terhadap <i>Financial Distress</i> (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat Tahun 2015-2018) | <p>Variabel Independen: Rasio Efektivitas, Efisiensi, Pertumbuhan, Kemandirian Keuangan, Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Opini Audit</p> <p>Variabel Dependen: <i>Financial distress</i></p> | <p>Kemandirian Keuangan tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap <i>Financial Distress</i>. Tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah yang tinggi belum tentu bisa memenuhi pelayanan publik sesuai dengan standar dikarenakan sebagian dari pemerintah daerah kabupaten/ kota mengalokasikan anggarannya untuk belanja pegawai. Sehingga dapat disimpulkan kemandirian keuangan pemerintah daerah yang tinggi belum tentu dapat menurunkan kondisi <i>financial distress</i>.</p> |
| 13. | Fitrah Illahi, Rice Haryati, dan Dica Lady Silvera (2021) | <i>The Effect Of Financial Independence, Degree Of Decentralization And Shopping Harmony In Predicting The Status Of Financial distress Of Regency And City Governments In West</i> | <p>Variabel Independen: Kemandirian Keuangan, Derajat Desentralisasi, Keselerasan Belanja</p> | <p>Kemandirian Keuangan tidak berpengaruh positif dalam memprediksi <i>Financial distress</i>.</p> <p>Derajat Desentralisasi tidak berpengaruh negatif</p> |

| No | Nama Peneliti | Judul Penelitian | Variabel Penelitian | Hasil Penelitian |
|-----|--|---|---|--|
| | | <i>Sumatra Province 2015-2017</i> | Variabel Dependen : <i>Financial distress</i> | dalam memprediksi <i>Financial distress</i> . Kemandirian Keuangan, Derajat Desentralisasi, Keselerasan Belanja berpengaruh secara simultan terhadap <i>Financial Distress</i> . |
| 14. | Rahima Zakia dan Fefri Indra Arza (2021) | Pengaruh Faktor Keuangan dan Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap <i>Financial Distress</i> (Studi Empiris Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2015-2019) | Variabel Independen: Rasio Efektivitas, Efisiensi, Solvabilitas, Pertumbuhan, Derajat Desentralisasi, Kompleksitas, Luas Wilayah, Opini Audit Variabel Dependen: <i>Financial distress</i> | Derajat Desentralisasi berpengaruh negatif terhadap <i>Financial Distress</i> . Hal tersebut menggambarkan bahwa semakin tinggi tingkat derajat desentralisasi pemerintah daerah maka semakin rendah kecenderungan pemerintah daerah mengalami kondisi <i>financial distress</i> . Derajat desentralisasi pemerintah daerah menandakan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pemerintah daerahnya sendiri sehingga pemerintah daerah yang dapat mengatur, mengelola dan menyusun pemerintah daerahnya sendiri tidak memiliki ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Pemerintah daerah yang tidak memiliki ketergantungan penuh terhadap pemerintah pusat dapat mengandalkan pendapatan asli daerahnya untuk mengoptimalkan belanja modalnya yang digunakan untuk pelayanan publik yang sesuai dengan standar. |

| No | Nama Peneliti | Judul Penelitian | Variabel Penelitian | Hasil Penelitian |
|-----|--|---|--|--|
| 15. | Mutiara Pangku & Lukfiah Irwan Radjak (2021) | Analisis <i>Financial Distress</i> Pada Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2014-2018 | <p>Variabel Independen:</p> <p>Kemandirian Keuangan, Pendapatan Asli Daerah, Solvabilitas, Belanja Daerah</p> <p>Variabel Dependen:</p> <p><i>Financial distress</i></p> | <p>Kemandirian Keuangan secara parsial tidak berpengaruh signifikan Positif terhadap <i>Financial Distress</i>.</p> <p>Kemandirian Keuangan, Pendapatan Asli Daerah, Solvabilitas, Belanja Daerah secara simultan berpengaruh positif terhadap <i>Financial Distress</i>.</p> |
| 16. | Melati Tegari Islamiyah, Ifa Ratifah, Firdaus (2022) | <i>Do Financial Ratio Predicting Financial Distress In Local Government</i> | <p>Variabel Independen:</p> <p>Kemandirian Keuangan dan Derajat Desentralisasi</p> <p>Variabel Dependen:</p> <p><i>Financial distress</i></p> | <p>Kemandirian Keuangan berpengaruh negatif terhadap <i>Financial Distress</i>. Tingkat kemandirian finansial menjadi penentu <i>financial distress</i>. Tinggi kemandirian finansial cenderung tidak mengalami financial distress atau pemerintah daerah memiliki dana yang cukup untuk membiayai kegiatan pemerintah tersebut. Semakin tinggi kemandirian keuangan pemerintah daerah, semakin sedikit ketergantungan pada dana dari pemerintah pusat atau provinsi dan kecil kemungkinan mengalami financial distress karena ketersediaan dana.</p> <p>Derajat Desentralisasi berpengaruh Positif terhadap <i>Financial Distress</i></p> |

| No | Nama Peneliti | Judul Penelitian | Variabel Penelitian | Hasil Penelitian |
|-----|--|--|--|---|
| 17. | Elfiyana dan Fefri Indra Arza (2022) | Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Faktor Keuangan terhadap Kondisi <i>Financial distress</i> di Indonesia | <p>Variabel Independen:</p> <p>Kemandirian Keuangan, Derajat Desentralisasi, Jumlah Penduduk, Rasio Efisiensi, Rasio Pertumbuhan, Rasio Efektifitas</p> <p>Variabel Dependen:</p> <p><i>Financial distress</i></p> | <p>Kemandirian Keuangan berpengaruh positif terhadap <i>Financial distress</i>. Semakin mandiri keuangan suatu daerah, maka peluang terjadinya <i>financial distress</i> semakin tinggi. Tidak selamanya semakin tinggi PAD maka semakin tinggi total alokasi belanja modal dalam menghindari <i>financial distress</i>.</p> <p>Derajat Desentralisasi berpengaruh negatif terhadap <i>Financial distress</i>. Kontribusi PAD dalam total pendapatan daerah akan mempengaruhi suatu daerah akan mengalami <i>financial distress</i> atau tidak. Semakin optimal kontribusi PAD dalam total pendapatan maka hal tersebut juga menunjukkan peningkatan kebijakan dan kemampuan yang dilakukan oleh suatu daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik.</p> |
| 18. | Fibrian Cahyo Pranoto, Handoko Arwi Hasthoro dan Nurwiyanta (2022) | Determinan <i>Financial distress</i> Pemerintah Daerah | <p>Variabel Independen:</p> <p>Kemandirian Keuangan, Derajat Desentralisasi Fiskal, Jumlah Penduduk</p> | <p>Kemandirian Keuangan berpengaruh negatif terhadap <i>Financial distress</i>. Pemerintah Daerah yang memiliki kemandirian keuangan tinggi yang tidak bergantung pada dana transfer pemerintah pusat, cenderung memiliki</p> |

| No | Nama Peneliti | Judul Penelitian | Variabel Penelitian | Hasil Penelitian |
|-----|--|---|--|--|
| | | | Variabel Dependen: <i>Financial distress</i> | <p>ketersediaan dana untuk membiayai pengeluaran di luar kebutuhan rutin dan tidak akan mengalami <i>financial distress</i>.</p> <p>Derajat Desentralisasi Fiskal berpengaruh negatif terhadap <i>Financial distress</i>. Hal ini berarti Pemerintah Daerah yang memiliki derajat desentralisasi yang tinggi cenderung tidak akan mengalami kondisi <i>financial distress</i> dikarenakan Pemerintah Daerah memiliki banyak kewenangan dan kebijakan untuk mengoptimalkan belanja modal dalam memberikan pelayanan publik yang memadai dan sesuai standar kepada masyarakat.</p> |
| 19. | Annisa Haryanti, Sandrayati & Yevi Dwitayanti (2022) | Pengaruh Derajat Desentralisasi Dan Budgetary Solvency Ratio Terhadap <i>Financial Distress</i> Pemda Kabupaten/Kota Sumsel Periode 2016-2020 | Variabel Independen: Derajat Desentralisasi Fiskal dan <i>Budgetary Solvency Ratio</i> Variabel Dependen: <i>Financial distress</i> | Derajat Desentralisasi Fiskal berpengaruh negatif terhadap <i>Financial distress</i> . Hal ini berarti Pemerintah Daerah yang memiliki derajat desentralisasi yang tinggi cenderung tidak akan mengalami kondisi <i>financial distress</i> . |

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Kemandirian Keuangan terhadap *Financial distress*

Sesuai pandangan teori *ketergantungan sumber daya*, menjelaskan bahwa pada pemerintah daerah, kekuatan (*power*) sumber daya keuangan dapat tercermin dari besarnya pendapatan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah tersebut, pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah rendah akan membutuhkan dana dari sumber lain (dana perimbangan) untuk memenuhi kebutuhannya. Tingginya Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen utama dalam mendukung kemandirian sumber daya keuangan, sehingga Pemerintah Daerah yang memiliki kemandirian keuangan yang tinggi akan memiliki kekuatan (*power*) untuk memenuhi kebutuhan daerahnya dengan mengalokasikan belanja modal lebih banyak untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga peluang terjadinya *financial distress* akan semakin kecil dibandingkan dengan daerah yang kemandirian keuangannya rendah.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa Kemandirian Keuangan berpengaruh negatif terhadap *Financial distress*. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah yang memiliki tingkat kemandirian keuangan yang tinggi maka cenderung tidak akan mengalami *financial distress*, karena Pemerintah Daerah tersebut memiliki kecukupan dana untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintah dan lebih sedikit menggunakan sumber dana bantuan dari Pusat/Provinsi. (Syurmita, 2014; Damaiyanti, 2018; Pranoto, Hathoro, & Nurwiyanta, 2022).

Secara jelas bahwa kemandirian keuangan berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. Semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan Pemerintah Daerah berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan daerahnya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat, sehingga probabilitas mengalami *financial distress* akan kecil kemungkinannya dibandingkan dengan daerah yang memiliki kemandirian keuangan rendah yang lebih banyak mengandalkan sumber dana eksternal dari Provinsi ataupun Pusat.

2.2.2 Pengaruh Derajat Desentralisasi terhadap *Financial distress*

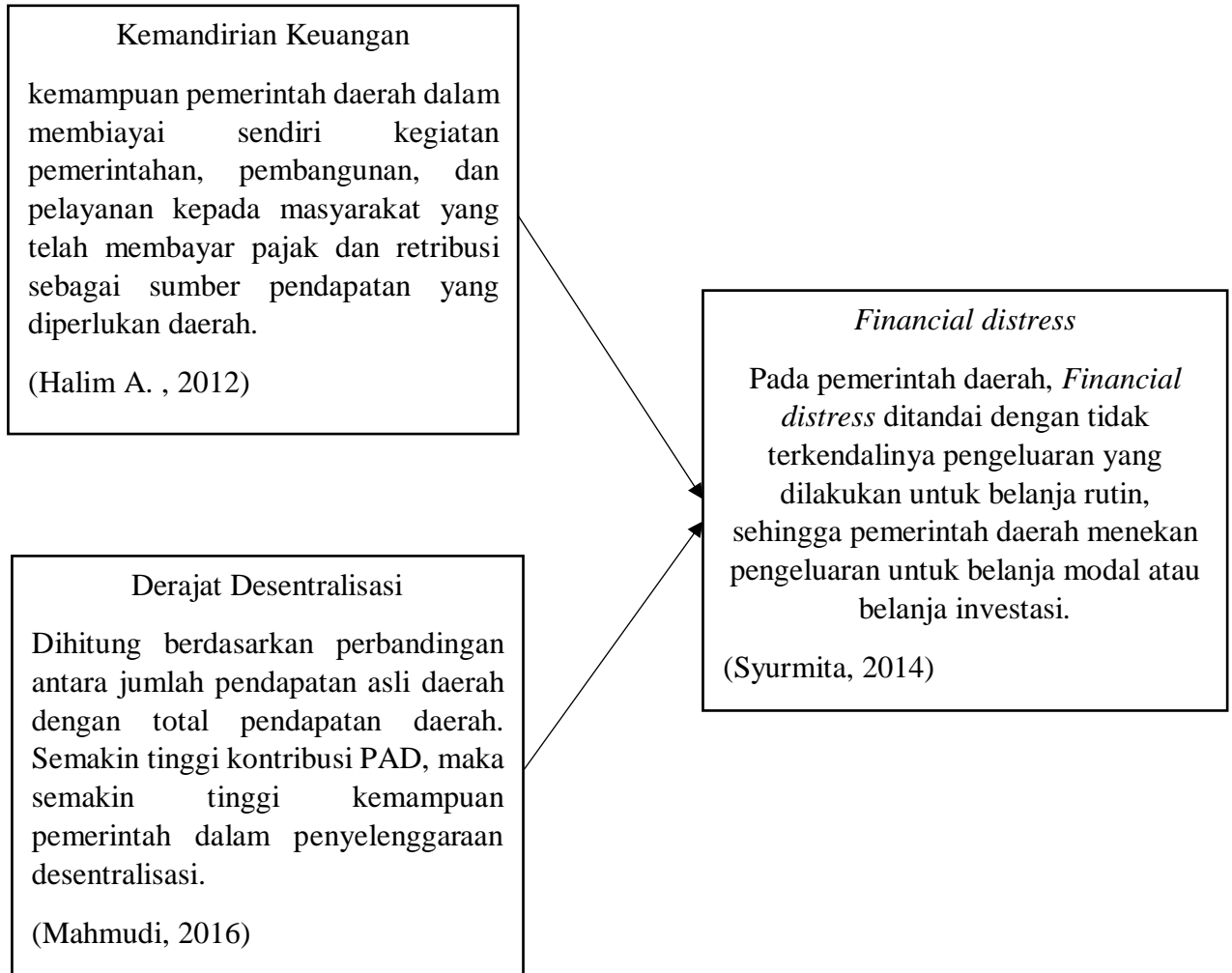
Sesuai pandangan *teori keagenan* yang membahas tentang hubungan antara *agent* dan *principal*, bahwa masyarakat sebagai *principal* telah mempercayakan Pemerintah Daerah sebagai *agent* dalam mengelola sumber daya daerahnya dengan tujuan untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat dengan menyusun kebijakan yang tepat dalam hal penyusunan anggaran. Hubungan ini tidak selamanya lancar dan kerap terjadi konflik diantara keduanya, dimana masyarakat memilih agar tujuan mereka tercapai, tetapi pemerintah memanfaatkan kondisi tersebut untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Konflik yang muncul disebabkan karena penyalahgunaan wewenang oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah yang kaya memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) tinggi, justru dengan wewenang yang dimilikinya telah melakukan pemborosan anggaran untuk pengeluaran rutin seperti belanja pegawai, sehingga Pemerintah Daerah tidak memiliki kecukupan dana untuk melakukan setiap kebijakan yang tepat untuk

pengoptimalan belanja modal, sehingga potensi terjadinya *Financial Distress* akan semakin tinggi. Hal tersebut karena kontribusi Pendapatan Asli Daerah saat penyelenggaraan kebijakan desentralisasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat kurang memadai karena dana yang dimiliki banyak digunakan untuk pengeluaran rutin seperti belanja pegawai.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa Derajat Desentralisasi berpengaruh positif terhadap *Financial distress*. Hal ini menunjukkan Pemerintah Daerah yang memiliki derajat desentralisasi yang tinggi cenderung akan mengalami kondisi *financial distress* dikarenakan kewenangan dan kebijakan yang dimiliki oleh daerah tersebut lebih banyak digunakan untuk pengeluaran rutin seperti belanja pegawai, sehingga daerah tersebut kekurangan dana untuk mengoptimalkan belanja modal yang sangat penting untuk pelayanan masyarakat. (Syurmita, 2014; Sartika, 2016; Husniati, Fitriasuri, & Wahasusmiah, 2016).

Secara jelas bahwa Derajat Desentralisasi berpengaruh positif terhadap *Financial distress*. Semakin tinggi kontribusi PAD (Pendapatan Asli Daerah) dalam pelaksanaan desentralisasi untuk memberikan pelayanan publik yang memadai maka cenderung akan mengalami *financial distress*.

2.2.3 Pradigma Penelitian



Gambar 1.1 Pradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori yang relevan, belum didasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2022).

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Kemandirian Keuangan berpengaruh negatif terhadap *Financial distress*.

H₂: Derajat Desentralisasi berpengaruh positif terhadap *Financial distress*.